

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Hasil Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan di desa-desa kecamatan pinogaluman Kabupaten Bolaang Mogondow Utara dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transparansi Pengelolaan Dana Desa di kecamatan pinogaluman dari aspek perencanaan dan pelaksanaan dilihat dari keseluruhan persentase skor capaian untuk variabel transparansi sebesar 87.8% dengan total skor sebesar 3850 semua alternatif jawaban responden berada pada kategori baik dan sangat baik.
2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di kecamatan pinogaluman dari pengawasan & pertanggungjawaban dan pelaksanaan dilihat dari keseluruhan persentase skor capaian untuk variabel akuntabilitas sebesar 90% dengan total skor sebesar 3300 semua alternatif jawaban berada pada kategori sangat baik.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah
  - a. Pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan terkait dengan kebijakan-kebijakan-kebijakan yang terkait langsung dengan tata cara pengelolaan Dana Desa kepada perangkat desa, sehingga perangkat desa memiliki kompetensi maupun pengetahuan yang memadai dengan pengelolaan Dana desa sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku..

- b. Transparansi pengelolaan dana desa di kecamatan pinogaluman masih tergolong baik, sehingga ini menjadi suatu acuan bagi pemerintah agar lebih baik lagi dalam pengelolaan dana desa lebih khususnya pada pembuatan laporan pertanggungjawaban

## 2. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Di harapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan sampel penelitian sehingga hasil penelitian lebih menggambarkan akuntabilitas dan transparansi desa sehingga penelitian tersebut dapat di bandingkan dengan penelitian lainnya.
- b. Di harapkan untuk peneliti selanjutnya, mampu mengidentifikasi program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. hal tersebut di maksudkan agar penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran spesifik mengenai program-program yang direalisasikan di desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Setiawan. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 11(22), 1–14.
- Asmawati, I., Basuki, P., & Rifai, A. (2018). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima). *E-Jurnal Akuntansi*, 25(3), 1–23.
- Astuti, T. P., & Yulianto. (2016). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No . 6 Tahun 2014*. 1(6), 1–14.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis* (Octaviana (ed.); 2nd ed.). PT Rajagrafindo Persada.
- Bawono, I. R., & Setiyadi, E. (2019). *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa* (C. Dr.Junaidi S.E M.Si (ed.)). PT Grasindo.
- Budiasni, N. W. N., & Ayuni, N. M. S. (2020). Transparency and Accountability Based on The Concept of “Pada Gelahang” Enhancing Village Financial Management. *International Journal of Social Science and Business*, 4(3), 501.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27.
- Hamid, A. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance. *Jurnal Akuntansi Islam Alauddin Makasar*, 1–164.
- Hardiningsih, P., O., R. M., Srimindarti, C., & Kristiana, I. (2019). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang). *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 21–42.
- Hartanti, N., & Yuhertiana, I. (2018). Transparency , Accountability and Responsibility in an Indonesia Village Financial Management. *Public Policy and Administration Research*, 8(3), 71–77.
- Iznillah, M. L., & Basri, Y. M. (2018). Analysis of Transparency and Accountability of Village Fund Management in Bengkalis Sub-district. *Journal of Economics, Business, and Government Challenges*, 1(2), 72–78.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa, 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa 2004 (2018).
- Kisnawati, B., Astini, Y., & Oktaviani, R. N. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas

- Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar. *Jurnal Valid*, Vol. 15(1), 1–10.
- Kumalasari, D., & Ikshan Budi Raharjo. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *An Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15.
- Ladewi, Y., Supriadi, T., Sjam, J., -, W., -, A., & Subowo, H. (2020). the Effect of Accountability and Transparency of Village Fund Management. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 28(2), 45–64.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan menteri keuangan RI Nomor.49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. *Peraturan Menteri Keuangan RI*, 1–47.
- Mentri desa Pembagunan daerah tertinggal da transmigrasi republik indonesia, 1 (2020).
- Monika Handayani. (n.d.). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Muindro Renyowijoyo. (2010). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Organisasi Non Laba* (2nd ed.). Mitra Wacana Media.
- Ni Luh Putu Ita Sulistiyawati. (2020). *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa*. 02(1), 11–38.
- Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 8, 31 (2016).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, 1 (2018).
- Permendes PDTT Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa nomor 5 Tahun 2015. (2015). *Permendes PDTT Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Nomor 5 Tahun 2015*. 1–6.
- Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., A., & Theresia Damayanti, S.E., M.Si., A. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah* (2nd ed.). UUP STUM YKPN.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (D. I. S. S. MT (ed.); 2nd ed.). Alfabeta.
- Suleman, A. R., Revinda, E., Soetijono, I. K., Siregar, R. T., Sofyan, Fauzal, A., Pendapotan, H., Rahmadana, M. F., Silalahi, M., & Ahmad Syafii. (2020). *Bumdes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa* (Janner Simamata (ed.); 1st ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Susilawati, D., Parwoto, P., Wulaningrum, P. D., & Tri Wijayanto, T. (2020). Good Governance Alokasi Dana Desa (ADD): Peran Perangkat dan Akuntabilitas Publik.

*Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 57–69.

- Syuroidah, N., Askandar, N. S., & Afifudin. (2018). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ( Studi Kasus di Desa Sumbersuko Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan). *E-Jra*, 07(05), 107–113.
- Theodorus M. Tuanakotta. (2019). *Audit Internal Berbasis Risiko* (Ema Sri Suharsi (ed.); 1st ed.). Salemba 4.
- Undang-Undang No 14. (2014). *Undang-Undang NO 14*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2(1), 45–54
- Wardani, D. K., & Utami, R. R. P. (2020). Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 28(1), 35–50.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 148.
- Zaman, B., & Diah Nurdiwaty. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. *Jurnal Peneliti Teori Akuntansi Dan Terapan Akuntansi*, 5(1), 1–22.